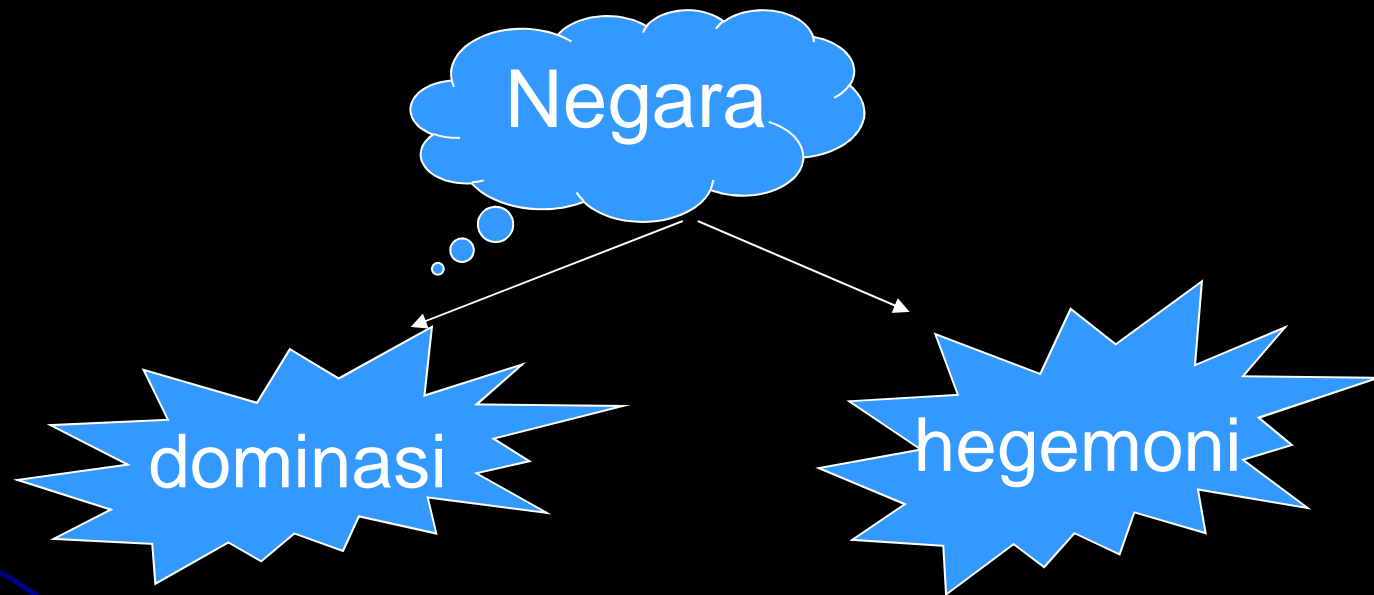


# Hubungan Warga Negara dengan Negara



# Teori hubungan warga negara dengan negara

- Teori otonomi relatif (Gramsci): negara dan masyarakat masing-masing memiliki otonomi yang bersifat relatif,
- Teori marxis: negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan *kaum borjuis*
- Teori pluralis: negara merupakan alat dari masyarakat

Teori organis (hegel): negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya

### **Asas hubungan warga negara dengan negara**

- Pemerintah yang melaksanakan hubungan dengan warganegara dalam rangka mencapai tujuan negara
- Tujuan negara adalah tujuan rakyat
- Negara alat dari sekumpulan manusia
- Untuk mencapai tujuan negara di serahkan kepada pemerintah

## Asas-asas yang dianut UUD 1945

1. Asas pancasila
2. Asas kekeluargaan
3. Asas kedaulatan rakyat
4. Asas pembagian kekuasaan
5. Asas negara hukum

Hubungan antara warga negara dengan negara dapat di lihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan dan kebudayaan

Perspektif hukum “ warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara  
(Isjwara:1980:90)

Perspektif politik “ warga negara adalah seorang individu yang bebas yang merupakan seorang anggota suatu masyarakat politik (negara) yang mempunyai bentuk pemerintahan yang demokratis

Wujud dari hubungan antara warga negara dengan negara berupa peranan

Peranan dapat di jabarkan sbb.

1. peranan yang ideal (ideal role)
2. Peranan yang seharusnya (espected role)
3. peranan yang di anggap oleh diri sendiri (perceined role)
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif.

Peranan sebagai pelaksana status meliputi peranan pasif, aktif, negatif dan positif

Peranan pasif: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Peranan aktif: aktifitas warga negara untuk ikut serta berpartisipasi mengambil bagian dalam kehidupan, terutama mempengaruhi kebijakan pemerintah

Peranan positif: aktifitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara

Peranan negatif: aktifitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan/hak yang bersifat pribadi

